



Pemerintah Kota  
**Padang Panjang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**(LKjIP)**

Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Padang Panjang

**Tahun 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, dengan rahmat-Nya penulisan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

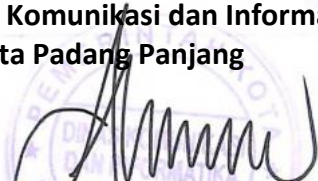
Laporan kinerja atau LKjIP merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kominfo Tahun 2019-2023 yang diuraikan dalam bentuk pencapaian target target indikator sasaran strategis sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019.

Dalam Laporan Kinerja ini juga diuraikan realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja pada tahun sebelumnya. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sudah memuaskan, untuk itu kinerja ini harus tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019, selain menjadi media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi, dan menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang agar pelaksanaan kinerja ke depan berjalan lebih produktif, efektif dan efisien.

Padang Panjang, Januari 2020

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Padang Panjang**

  
**Drs. AMPERA, SH.M.Si**  
**NIP. 196810703 198203 1 008**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019 disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diharuskan untuk melaporkan hasil kinerja atau keberhasilan yang telah dicapai atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban OPD atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, dalam LKjIP ini dipaparkan evaluasi atas capaian dan tingkat pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019, yang berguna sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan:

1. Sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban, dan sekaligus sebagai media peningkatan kinerja.
2. Untuk mengetahui hasil pencapaian kinerja Dinas, Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang periode tahun 2019
3. Agar sumber-sumber anggaran yang dialokasikan penggunaannya dapat lebih efektif dan efisien pemakaiannya.
4. Sebagai dasar penilaian kinerja dan pedoman dalam meningkatkan kinerja.

Dinas, Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang melalui program dan kegiatan yang tepat sasaran. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) ini bertujuan :

1. Sebagai indikator dalam melihat keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
2. Dapat menjadi acuan dalam menyusun Lakip Pemerintah Kota Padang Panjang dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Panjang.
3. Sebagai program strategis dalam pengembangan sumber daya manusia.

## **C. Penjelasan Umum Organisasi**

### **C.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dalam rangka melaksanakan kewenangan dibidang Komunikasi dan Informatika, maka berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019, ditetapkanlah tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, .

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kota Padang Panjang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang E-Government dan Teknologi Informasi;
4. Bidang Informasi Komunikasi Publik;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Persandian serta tugas pembantuan yang diberikan.

2. **Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian
- b. Pengelolaan program administrasi keuangan
- c. Pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan urusan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana serta Kehumasan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, kehumasan.
- b. **Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

3. **Bidang E-Government dan Teknologi Informasi**, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan di bidang Pengelolaan E-Government, Statistik dan Persandian Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program infrastruktur teknologi dan persandian

- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program aplikasi informatika dan statistik.
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program layanan e-government.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang E-Government dan Teknologi Informasi terdiri dari :

- a. **Seksi Infrastruktur Teknologi dan Persandian**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Infrastruktur teknologi dan Persandian.
- b. **Seksi Statistik**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi AStatistik.
- c. **Seksi Layanan Aplikasi**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Layanan Aplikasi.

- 4. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan informasi publik.
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan komunikasi publik.
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program layanan informasi publik dan media.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

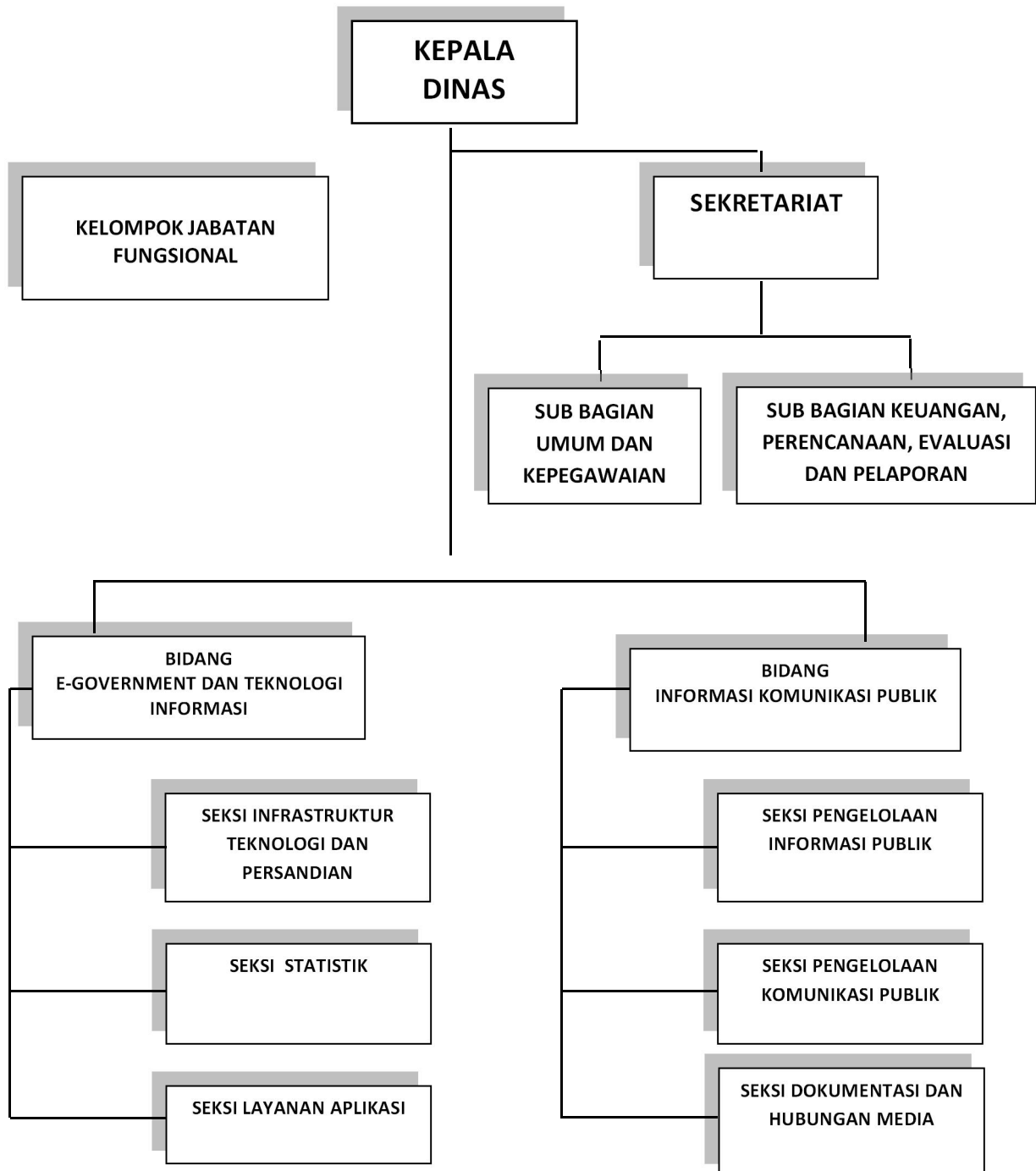
- a. **Seksi Pengelolaan Informasi Publik**, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di Lingkup Pemerintah Daerah.

- b. **Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengendalian komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di daerah.
- c. **Seksi Dokumentasi dan Hubungan Media**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik dan hubungan dengan media.

## 5. Kelompok Jabatan Fungsional

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG





## **C.2 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

Secara kuantitatif jumlah pegawai sebagai personil (aparatur) yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sehari-harinya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada akhir tahun 2019, berjumlah sebanyak 61 (Enam puluh satu) orang, yang terdistribusi pada Sekretariat dan Bidang. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 21 orang atau 34 % berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan sebanyak 40 orang atau 66 % berstatus pegawai harian. Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang menunjukkan sebanyak 16 (enam belas) orang atau 76 % berstatus pegawai negeri sipil yang telah menamatkan pendidikan kesarjanaaan (D.III hingga S2).

Sumber daya manusia pegawai negeri sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berdasarkan tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH (ORANG)</b>
1	Strata 3	-
2	Strata 2	4
3	Strata 1	7
4	Diploma 3	5
5	Diploma 2	-

6	Diploma 1	-
7	SLTA	5
8	SLTP	-
9	SD	-
	<b>J u m l a h</b>	<b>21</b>

Sedangkan sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dilihat dari tingkat kepangkatannya dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

**Tabel 1. 2**  
**Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Berdasarkan Tingkat Kepangkatan**

<b>NO</b>	<b>PANGKAT/GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH (ORANG)</b>
1	Pembina Utama Muda / IV.c	-
2	Pembina Tingkat I / IV.b	2
3	Pembina / IV.a	-
4	Penata Tingkat I / III.d	5
5	Penata / III.c	3
6	Penata Muda Tingkat I / III.b	4
7	Penata Muda / III.a	3
8	Pengatur Tingkat I / II.d	1
9	Pengatur / II.c	4
10	Pengatur Muda Tingkat I / II.b	-
11	Pengatur Muda / II.a	-
12	Juru Tingkat I / I.d	-
13	Juru / I.c	-
14	Juru Muda Tingkat I / I.b	-
15	Juru Muda / I.a	-
	<b>J u m l a h</b>	<b>21</b>

Terkait dengan tingginya intensitas kerja dibidang Teknologi Informasi, dan kebutuhan akan tenaga teknis yang belum ditempati oleh formasi ASN, maka direkrutlah Tenaga Harian Lepas terutama untuk beberapa posisi teknis. Berikut data terkait dengan keberadaan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

**Tabel 1. 3**  
**Data Tenaga Harian Lepas/Non ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019**

<b>Unit Kerja</b>	<b>Ketugasan</b>	<b>Jumlah</b>
Sekretariat	Sopir	2
	Penjaga Kantor	2
	Tenaga kebersihan	4
Bidang IKP	Tenaga Pemasaran	2
	Tenaga pengolah data PPID	2
	Pengelola data komunikasi	1
	Tenaga Liputan	5
	Tenaga humas	1
	Tenaga teknis multimedia kota	2
	Pengelola videotron	1
Bidang E Government dan TI	programmer	6
	Teknisi jaringan kota	3
	Teknisi jaringan	2
	operator	6
	Pengelola data	1
Jumlah		44

#### **D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan sistematika penulisan yang mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, sebagai berikut :

Pengantar

Daftar Isi

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Penjelasan Umum Organisasi
- D. Sistematika Penyusunan LKj IP

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Penetapan Kinerja Dinas, Kominfo Tahun 2019

Bab III : Akuntabilitas Kinerja 2019

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### A. Visi dan Misi

Visi dan misi Walikota Padang Panjang periode 2019-2023, merupakan dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD. Visi misi tersebut adalah sebagai berikut :

***“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat ”***

Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 4 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu :

1. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi
2. Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
3. Kesehatan : Padang Panjang Sehat dan Bahagia
4. Memantapkan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat

Dalam Pembangunan

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Padang Panjang, Dinas Kominfo berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-3 RPJMD yakni **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif** yang selanjutnya diwujudkan melalui sasaran **Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.**

Salah satu indikator dalam pencapaian sasaran RPJMD terkait kinerja pemerintahan ini adalah meningkatnya indeks Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi dalam hal ini dimaksudkan adalah terlaksananya berbagai upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur sehingga tercipta birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Kota Padang Panjang sebagai kota yang cerdas (Smart City) melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimana melalui pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan akan terwujud pembaharuan berupa peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan OPD adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan yang merupakan jabaran dari visi dan misi pembangunan, serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Beranjak dari pencapaian misi ke 3 dan sasaran RPJMD dirumuskan Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sebagai berikut : **Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi**

Untuk mencapai tujuan untuk diwujudkan melalui 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

**Sasaran 1** : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi

**Sasaran 2** : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

**Sasaran 3** : Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia

Tujuan, sasaran berikut indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang untuk tahun 2019 tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2019 dan dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2.1**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
				2019
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi		Indeks SPBE	1,86
		Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,86
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	71 (Cukup informatif)
		Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	25%

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA 2019

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan.

#### A.1 Evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan Penetapan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja untuk mendukung 3 (tiga) sasaran strategis yang diuraikan sebagai berikut :

*Tabel 3.1*

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat terlihat dari tabel berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya pemerintahan responsif, efisien, transparan dan berbasis	kinerja yang efektif, partisipatif teknologi	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,86	2,67	143%



	informasi				
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	71 (Cukup informatif)	78,8 (Cukup informatif)	111%
3	Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	25%	21%	84%

Berdasarkan tabel di atas pencapaian kinerja untuk masing masing sasaran strategis dapat di jelaskan sebagai berikut :

**Sasaran 1 : Meningkatkan kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi**

*Tabel 3.2*

*Evaluasi pencapaian sasaran strategis : Meningkatkan kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi*

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,86	2,67	143%

Indikator pada sasaran ini adalah pemenuhan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan target sebesar 1,86. Pengukuran Indikator ini dilakukan melalui pengukuran indeks oleh Kemenpan-RB yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali, pengukuran sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2018, dan jadwal pengukuran berikutnya adalah pada tahun 2020. Untuk itu pada tahun 2019 ini pengukuran capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan melalui pengukuran mandiri (*self assesment*) oleh Dinas Kominfo Padang Panjang dengan pendampingan oleh Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah.

Untuk nilai indeks dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5.0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*)

dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Tujuan dilakukannya Evaluasi SPBE 2019 adalah untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kota Padang Panjang dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sesuai dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik , penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 - Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 - Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Berdasarkan hasil self assesment tersebut diperoleh nilai indeks SPBE sebesar 2,67 dalam artian bernilai baik. Lebih lanjut mengenai mekanisme pengukuran dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pada Domain Kebijakan diperoleh nilai indeks sebesar 2,35 dalam artian secara rata-rata capaian nilai dari aspek-aspek serta indikator-indikator yang mendukung Domain Kebijakan sudah cukup baik, meskipun belum sempurna, dengan demikian ruang untuk meningkatkan pemenuhan nilai pada masing-masing aspek dan indikator pada Domain Kebijakan masih cukup besar.

Pada Domain Tata Kelola diperoleh nilai indeks sebesar 2,29 dalam artian secara rata-rata capaian nilai dari aspek-aspek serta indikator-indikator yang mendukung Domain Tata Kelola sudah cukup baik, meskipun belum sempurna, dengan demikian ruang untuk meningkatkan pemenuhan nilai pada masing-masing aspek dan indikator pada Domain Tata Kelola juga masih cukup besar.

Terakhir pada Domain Layanan diperoleh nilai indeks sebesar 2,97 dalam artian secara rata-rata capaian nilai dari aspek-aspek serta indikator-indikator yang mendukung Domain Layanan sudah cukup baik dan meskipun belum sempurna ini adalah nilai tertinggi diantara ketiga Domain, Hal ini tidak terlepas dari tingginya implementasi dari konsepsi Smart City dalam kaitan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik berbasis elektronik di Kota Padang Panjang.

Lebih lanjut ruang untuk meningkatkan pemenuhan nilai pada masing-masing aspek dan indikator pada Domain Layanan ini juga masih cukup besar, mengingat pada tahun 2020 mulai dilakukan pemenuhan dokumen-dokumen regulasi yang menjadi komponen penilaian terutama pada domain pertama dan domain kedua.

Perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya dan dengan target capaian yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Kominfo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3**

**Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun sebelumnya**

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator	
		2018	2019
1	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	na	2,67

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa indeks SPBE ini belum diukur capaiannya pada tahun 2018, dan baru diakomodir menjadi indikator sasaran untuk Renstra periode ini.

**Tabel 3.4**

**Perbandingan Realisasi Kinerja dan target Renstra**

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi**

No	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi s.d 2019	Capaian %
----	-------------------	----------------------	--------------------	-----------

1	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	2,67	89%
---	--	---	------	-----

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja pada tahun 2019 ini dikaitkan dengan target di akhir tahun Renstra sudah mencapai 89 %, dimana dari target akhir nilai indeks “3” pada tahun ini sudah diraih indeks sebesar “2,67” .

Dari beberapa tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran ini sudah cukup baik dan melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Capaian ini dapat terlihat dengan tingginya persentase capaian bahkan jika dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2023.

Adapun beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

1. Tingginya penetrasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sekaitan implementasi Smart City di Kota Padang Panjang yang merupakan bagian dari 100 Kab/ Kota percontohan dalam Gerakan Nasional Menuju 100 Smart City 2019 yang lalu.
2. Awareness dari seluruh OPD terhadap pentingnya implementasi sistem berbasis elektronik dalam setiap layanan yang dilaksanakan pada setiap OPD, baik itu layanan dalam internal pemerintahan apalagi dalam layanan publik untuk masyarakat.

## Sasaran 2 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Tabel 3.3

Evaluasi pencapaian sasaran strategis : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi	Persentase Pemingkatan	71	78,8	111%

Publik	Keterbukaan Informasi Publik	(Cukup informatif )	(Cukup informatif)	
--------	------------------------------	---------------------	--------------------	--

Indikator pada sasaran ini adalah pemenuhan Persentase Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik dengan target sebesar 71% dalam artian “ cukup informatif ” . Berdasarkan hasil assesment Komisi Informasi Prov. Sumatera Barat terhadap badan layanan publik (PPID) Kota Padang Panjang, diperoleh hasil Keterbukaan Informasi Publik sebesar 78,8 % dalam artian “**cukup informatif**” . Ada 3 (tiga) indikator utama yang dijadikan KI dalam penilaian keterbukaan informasi publik ini yang meliputi, penyebaran questioner, penilaian website dan penilaian visitasi (kunjungan lapangan) yang diadakan pada bulan November 2019.

**Sasaran 3 : Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia**

**Tabel 3.4**

**Evaluasi pencapaian sasaran strategis : Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	25%	21%	84%

Indikator pada sasaran ini adalah pemenuhan Persentase Data Statistik Sektoral yang terpublikasi sebanyak 25 %, dan terealisasi sebesar 21 % atau dengan capaian kinerja 84%. Rendahnya capaian pada indikator ini disebabkan masih belum maksimalnya koordinasi yang baik dan intensif dengan stakeholder terkait. Sementara itu berdasarkan koordinasi dengan BPS terkait dengan penatalaksanaan Satu Data Indonesia, kategorisasi publikasi data yang memenuhi standar SDI (Satu Data Indonesia) baru akan dirumuskan pada tahun 2020 ini.

Kedepan untuk meningkatkan capaian kinerja pada indikator sasaran ini i dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pihak BPS (Badan Pusat Statistik), sehingga ke depan Dinas Kominfo dapat lebih maksimal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Wali Data terkait dengan pemenuhan statistik sektoral dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia.

## A. 2 Evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Program

Pencapaian indikator kinerja program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat terlihat dari tabel berikut :

Tabel 3.4

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	E Government	Persentase implementasi e-	64%	89%	139%



		government			
2	Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas informasi publik	2,6	3,2	123%

## **B. Evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan**

Pencapaian indikator kinerja kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat terlihat dari tabel berikut :

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2019		Target Kinerja dan Anggaran (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2019		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	1105	788.705.000	1105	996.965.000		919.562.295	1105	919.562.295	1105	919.562.295	100%	101%	Sekretariat
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	2	2.925.000	2	4.185.000	2	2.834.500	2	2.834.500	2	2.834.500	100%	97%	Sekretariat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi / Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayarkan	3	123.400.000	3	123.400.000	3	96.302.834	3	96.302.834	3	96.302.834	100%	78%	Sekretariat
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8	126.280.000	8	140.280.000	8	124.603.012	8	124.603.012	8	124.603.012	100%	99%	Sekretariat
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit gedung yang dipelihara/dibersihkan	1	172.600.000	1	152.600.000	1	152.531.523	1	152.531.523	1	152.531.523	100%	88%	Sekretariat
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah jenis ATK	3	14.000.000	3	17.000.000	3	16.973.000	3	16.973.000	3	16.973.000	100%	121%	Sekretariat
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3	17.500.000	3	14.500.000	3	13.474.100	3	13.474.100	3	13.474.100	100%	77%	Sekretariat

7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen listrik yang tersedia	10	10.000.000	10	10.000.000	10	9.972.900	10	9.972.900	10	9.972.900	100%	100%	Sekretariat
8	Penyediaan Makan dan Minum	jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	1000	35.000.000	1000	30.000.000	1000	29.979.075	1000	29.979.075	1000	29.979.075	100%	86%	Sekretariat
9	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah	75	287.000.000	75	505.000.000	75	472.891.351	75	472.891.351	75	472.891.351	100%	165%	Sekretariat
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>12</b>	<b>162.900.000</b>	<b>12</b>	<b>160.400.000</b>		<b>152.666.000</b>	<b>12</b>	<b>152.666.000</b>	<b>12</b>	<b>152.666.000</b>	<b>100%</b>	<b>88%</b>	<b>Sekretariat</b>
10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	6	87.900.000	6	87.900.000	6	85.827.300	6	85.827.300	6	85.827.300	100%	98%	Sekretariat
11	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	jumlah gedung yang dipelihara	1	50.000.000	1	50.000.000	1	49.946.700	1	49.946.700	1	49.946.700	100%	100%	Sekretariat
12	Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Kantor	jumlah jenis alat-alat kantor yang terpelihara	5	25.000.000	5	22.500.000	5	16.892.000	5	16.892.000	5	16.892.000	100%	68%	Sekretariat
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek</b>	<b>6</b>	<b>50.000.000</b>	<b>6</b>	<b>50.000.000</b>	<b>6</b>	<b>43.748.600</b>	<b>6</b>	<b>43.748.600</b>	<b>6</b>	<b>43.748.600</b>	<b>100%</b>	<b>87%</b>	<b>Sekretariat</b>

13	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek	6	50.000.000	6	50.000.000	6	43.748.600	6	43.748.600	6	43.748.600	100%	87%	Sekretariat
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA &amp; KEUANGAN</b>		<b>25</b>	<b>1.800.000</b>	<b>25</b>	<b>1.400.000</b>	<b>25</b>	<b>1.800.000</b>	<b>25</b>	<b>1.800.000</b>	<b>25</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Sekretariat</b>
14	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	22	1.300.000	22	1.100.000	22	1.300.000	22	1.300.000	22	1.300.000	100%	100%	Sekretariat
15	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	3	500.000	3	300.000	3	500.000	3	500.000	3	500.000	100%	100%	Sekretariat
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK</b>		<b>667</b>	<b>2.418.755.325</b>	<b>667</b>	<b>2.580.200.250</b>		<b>2.381.851.284</b>	<b>1134</b>	<b>2.381.851.284</b>	<b>1134</b>	<b>2.381.851.284</b>	<b>114%</b>	<b>72%</b>	<b>IKP</b>
16	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Kota Padang Panjang	Jumlah KIM yang aktif	2	49.450.000	2	23.661.000	2	19.661.600	2	19.661.600	2	19.661.600	100%	40%	IKP
17	Pembinaan dan Pengembangan Media Tradisional	Jumlah Media Tradisional yang dibina	1	125.150.000	1	125.150.000	1	95.635.636	1	95.635.636	1	95.635.636	100%	76%	IKP
18	Penayangan Dialog Interaktif pada Media Televisi	Jumlah penyelenggaraan dialog interaktif Pemerintah Daerah dengan masyarakat melalui pemanfaatan media televisi	4	149.830.000	4	109.330.000	3	17.485.100	3	17.485.100	3	17.485.100	75%	12%	IKP

19	Pemberdayaan Jaringan Komunikasi Sosial	jumlah release berita mengenai informasi aktual di Lingkungan Pemko Padang Panjang melalui pemanfaatan media sosial	360	162.645.375	360	206.996.000	996	200.135.882	738	200.135.882	738	200.135.882	205%	123%	IKP
20	Pengelolaan Media Luar Ruang Videotron	Jumlah konten videotron (non komersil) dan peningkatan PAD Kota Padang Panjang melalui komersialisasi videotron	180	242.145.375	180	194.734.000	270	181.485.896	270	181.485.896	270	181.485.896	150%	75%	IKP
21	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Informasi Publik	Jumlah OPD yang sudah mengelola Daftar Informasi Publik	10	109.919.075	10	115.914.250	10	105.106.760	10	105.106.760	10	105.106.760	100%	96%	IKP
22	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui media massa	Jumlah media massa yang mempublikasikan informasi kegiatan pembangunan daerah	56	1.243.615.500	56	1.597.615.000	56	1.563.895.560	56	1.563.895.560	56	1.563.895.560	100%	126%	IKP
23	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah penerbitan majalah Serambi Mekkah	4	283.000.000	4	182.500.000	4	176.223.750	4	176.223.750	4	176.223.750	100%	62%	IKP
24	Pembinaan dan Pelatihan Badan Koordinasi Kehumasan	Jumlah peserta pelatihan	50	53.000.000	50	24.300.000	50	22.221.100	50	22.221.100	50	22.221.100	100%	42%	IKP
VI	<b>PROGRAM E-GOVERNMENT</b>		<b>281</b>	<b>7.990.214.000</b>	<b>281</b>	<b>5.995.112.750</b>		<b>5.361.670.451</b>	<b>281</b>	<b>5.361.670.451</b>	<b>281</b>	<b>5.361.670.451</b>	<b>100%</b>	<b>47%</b>	<b>E-Gov</b>
25	Pengelolaan Layanan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Kota Padang Panjang	Jumlah Node Akses Intenet yang terkelola	69	1.815.350.000	69	949.600.000		897.553.160	69	897.553.160	69	897.553.160	100%	49%	E-Gov
26	Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi (Command	Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola	6	5.266.201.800	6	4.595.001.750		4.157.132.695	6	4.157.132.695	6	4.157.132.695	100%	79%	E-Gov

	Centre)														
27	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Padang Panjang Smart City	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	6	765.302.200	6	368.401.000		274.576.471	6	274.576.471	6	274.576.471	100%	36%	E-Gov
28	Pelatihan SDM Dalam Bidang Teknologi Informasi	Jumlah peserta pelatihan	200	143.360.000	200	82.110.000		32.408.125	200	32.408.125	200	32.408.125	100%	23%	E-Gov
VII	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK SEKTORAL DAERAH</b>	<b>Persentase Data yang memenuhi standar satu data Indonesia</b>	<b>2</b>	<b>58.335.000</b>	<b>2</b>	<b>58.335.000</b>		<b>28.413.625</b>	<b>2</b>	<b>28.413.625</b>	<b>2</b>	<b>28.413.625</b>	<b>100%</b>	<b>49%</b>	<b>E-Gov</b>
29	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen statistik sektoral yang diadakan	2	58.335.000	2	58.335.000	2	28.413.625	2	28.413.625	2	28.413.625	100%	49%	E-Gov
VIII	<b>PROGRAM PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan sertifikat elektronik/tanda tangan digital</b>	<b>24</b>	<b>23.520.000</b>	<b>24</b>	<b>23.520.000</b>		<b>-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>E-Gov</b>
30	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah peserta pelatihan	24	23.520.000	24	23.520.000	-	-	0	-	0	-	0%	-	E-Gov
			<b>2122</b>		<b>2.122</b>	<b>9.865.933.000</b>		<b>8.889.712.255</b>	<b>2.565</b>	<b>8.889.712.255</b>	<b>2565</b>	<b>8.889.712.255</b>	<b>89%</b>	<b>68%</b>	
<b>Rata-rata capaian kinerja %</b>							<b>90%</b>	<b>121%</b>		<b>77%</b>	<b>121%</b>	<b>77%</b>			

## B. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Realisasi pencapaian anggaran kinerja keuangan tahun 2019 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan data hasil pengukuran kinerja keuangan. Keberhasilan capaian indikator kinerja keuangan diatas tidak terlepas dari dukungan dana. Alokasi anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada tahun 2019 yang dialokasikan sebesar Rp. 9.857.314.000,- dari jumlah tersebut telah dapat direalisasikan sebesar 8.990.626.317,- atau 91,21%.

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Pada Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>				
	- Belanja Pegawai	<b>2.858.495.000,-</b>	<b>2.791.211.251,-</b>	<b>67.283.749,-</b>	<b>97,65</b>
	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>				
	- Belanja pegawai	<b>82.538.150,-</b>	<b>73.640.715,-</b>	<b>8.897.135,-</b>	<b>89,2</b>
	- Belanja barang & jasa	<b>5.655.429.000,-</b>	<b>4.896.024.326,-</b>	<b>759.404.674,-</b>	<b>86,6</b>
	- Belanja hibah	<b>36.240.000,-</b>	<b>36.211.100,-</b>	<b>28.900,-</b>	<b>99,9</b>
	<b>J u m l a h</b>	<b>9.857.314.000,-</b>	<b>8.990.626.317,-</b>	<b>866.687.683,-</b>	<b>91,21</b>

Realisasi anggaran sebesar Rp. 8.990.626.317,-atau 91,21 % dibawah anggaran yang dikarenakan ada efisiensi pada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sesuai target.

Akuntabilitas keuangan berdasarkan program/kegiatan berdasarkan pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:





Tabel 3.9

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Triwulan IV		Ket	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV		Ket
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terimplementasikannya Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan E Government	= (0,25 x kebijakan e gov) + (0,25 tata kelola e-gov) +(0,5 layanan e gov)	2,6	2,7	104	Skala 1-4	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b> 1. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 2. Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi 3. Pembinaan dan Pengembangan Sitem Informasi 4. Pengelolaan Website Kota Padang Panjang 5. Penyusunan Rencana Induk E Government <b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi</b> 6. Pelatihan SDM dalam bidang Teknologi Informasi	Rp. 904.100.000	Rp. 812.526.500	89,87	
								2. Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi	Rp. 858.600.000	Rp. 755.145.197	87,95	
								3. Pembinaan dan Pengembangan Sitem Informasi	Rp. 801.523.900	Rp. 656.607.233	81,92	
								4. Pengelolaan Website Kota Padang Panjang	Rp. 51.600.000	Rp. 50.678.200	98,21	
								5. Penyusunan Rencana Induk E Government	Rp. 38.950.000	Rp. 9.293.875	23,86	
								6. Pelatihan SDM dalam bidang Teknologi Informasi	Rp. 150.585.000	Rp. 119.183.725	79,15	

2	Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi terkait kebijakan publik	Persentase peningkatan sebaran informasi dan komunikasi pemerintah Daerah	=(A+B)/2 A = Jumlah KIM& Metra yang terbentuk /jumlah target x 100% B = Jumlah jenis berita OPD yang terpublikasikan /jumlah target x 100%	90%	133 %	148	8 dari 8 target kelompok, dan release berita 599 dari target 360	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>				
								1. Penayangan dialog interaktif pada media televisi	Rp. 185.780.000	Rp.22.721.575	12,23	
								2. Pemberdayaan jaringan komunikasi sosial	Rp. 159.600.000	Rp. 155.182.200	97,23	
								3. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Rp. 48.250.000	Rp. 40.482.400	83,90	
								4. Pengelolaan Media Luar Ruang (Videotron)	Rp. 89.238.150	Rp. 71.930.715	80,61	
								5. Fasilitasi Pemilihan Media Tradisional	Rp. 109.400.000	Rp. 99.428.382	90,89	
								6. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Rp. 1.820.410.000	Rp. 1.814.924.100	99,70	
								7. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Rp. 112.500.000	Rp. 103.941.095	92,39	

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

LKJIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban tertulis atas asas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan sekaligus memberikan gambaran dan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis, diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang sangat memuaskan dengan tingkat capaian rata rata di atas 100%. Salah satu faktor pendukung keberhasilan ini adalah cukup tingginya komitmen dan dari Kepala Daerah dan dukungan dalam hal kebijakan untuk merealisasikan ketersediaan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai pondasi dasar kesiapan kota Padang Panjang menjadi kota yang cerdas “Smart City” .

### **B. Saran**


Dalam rangka mewujudkan Kota Padang Panjang menjadi “Smart City” , ada beberapa hal perlu ditindaklanjuti terkait pencapaian kinerja Dinas Kominfo di masa yang akan datang, diantaranya:

1. Masih perlunya dukungan anggaran dan SDM TI yang mumpuni guna meningkatkan kemampuan dan kualitas layanan Infrastruktur jaringan, terkait banyaknya keluhan terkait lemahnya koneksi jaringan atau unit-unit kerja yang belum terkoneksi jaringan.
2. Perlunya koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi yang intens antara OPD dengan dinas Kominfo terkait penatalaksanaan TI guna percepatan pelaksanaan e-government .

Selanjutnya, diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) ini dapat memberi umpan balik guna peningkatan efisiensi serta efektifitas pelaksanaan urusan bidang komunikasi dan informatika sekalligus sebagai bahan dan pedoman untuk mengevaluasi dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya.

Padang Panjang, Januari 2020

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Padang Panjang**



**Drs. AMPERA, SH.M.Si**

**NIP. 196810703 198203 1 00**